

Judul : BP Haji Naik Kelas Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Tanggal : Sabtu, 30 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

BP Haji Naik Kelas Menjadi Kementerian Haji & Umrah

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini diharapkan akan menjadi terobosan di bidang haji dan umrah. Lantas, apa saja yang akan dilakukan kementerian ini?

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal selaku pimpinan rapat, meminta persetujuan kepada seluruh anggota yang hadir.

"Apakah Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perjalanan Haji dan Umrah dapat setuju untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Cucun di ruang rapat.

"Setuju," jawab para anggota DPR serentak. Sebelum persetujuan diambil, rapat paripurna terlebih dahulu mendengar laporan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan

Dasopang, mengenai hasil pembahasan revisi undang-undang tersebut. Marwan menjelaskan, salah satu poin utama revisi adalah perubahan kelembagaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berbentuk BP Haji, kini ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat, kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah," ujar Marwan dalam laporannya.

Menurut dia, kehadiran kementerian baru ini akan menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi di bawah satu atap. "Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menjadi *one stop service*. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah," kata Marwan. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah akan fokus pada persiapan pelaksanaan haji musim

2026. Terutama masalah data jemaah, istihah (kemampuan kesehatan dan standar pelayanan kepada jemaah).

"Kami dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Namun, kami dimudahkan karena sudah terlatih persiapan haji sejak 2025 dan akan full menangani di tahun 2026 ini," ujar Dahnil kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (29/8/2025).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin menilai perubahan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah merupakan sebuah terobosan. Tetapi, dia menegaskan, perlu ada langkah khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait haji.

"Kerja kerasnya harus ekstra ya. Apalagi pembentukannya menjelang akhir tahun 2025 dan pelaksanaannya sudah di awal tahun 2026," ujar Andhyka kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (29/8/2025).

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Dahnil Anzar Simanjuntak dan Andhyka Muttaqin mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, berikut wawancaranya.

DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK
Wakil BP Haji

Tahun Ini, Kami Fokus Benahi Data Jemaah



Kementerian Haji dan Umrah nanti akan menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan dan pengelolaan haji Indonesia. Mulai dari penyelenggaraan, pelayanan dan pengembangan ekonomi haji.

DPR sudah menyetujui perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, kedepannya akan seperti apa Kementerian ini?

Kementerian Haji dan Umrah nanti akan menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan dan pengelolaan haji Indonesia. Mulai dari penyelenggaraan, pelayanan dan pengembangan ekonomi haji.

Bagaimana sumber daya manusianya?

Pengawasan ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan dan instansi lainnya. Namun, di tingkat provinsi dan kabupaten/beser dari Kementerian Agama.

Apa ada syarat khusus untuk

tingkat provinsi dan kabupaten ini? Syaratnya kompetensi dan integritas.

Apakah pegawai di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama otomatis ke Kementerian Haji dan Umrah? Sebagian ASN di PHU akan pindah terutama pelaksana teknis dan beberapa pejabat yang kompeten dan berintegritas.

Apakah Kementerian Haji dan Umrah ini langsung sepenuhnya memegang kendali penyelenggaraan haji 2026? Atau akan masih bersama Kementerian Agama?

Sejak undang-undang ditetapkan, kendali penyelenggaraan ada di bawah BP Haji sampai Peraturan Presiden. Lalu ketika Peraturan Presiden dikeluarkan oleh Presiden, menjadi Kementerian Haji.

Apa saja yang akan menjadi fokus dari Kementerian Haji dan Umrah pada tahun pertama ini? Kami akan fokus pada pembenahan data jemaah agar transparan dan akurat. Kemudian masalah teriikah kesehatan dan banyak lagi SOP-SOP penyelenggaraan yang baru kami persiapkan.

Selain itu, ada lagi? Ya termasuk mendukung percepatan pembangunan kampung haji yang akan dibangun di Makkah, sesuai perintah Presiden. Namun yang jelas, Kementerian Haji dan Umrah ini adalah *force* yang maju dari Presiden Prabowo-Suharto juga DPR. Serta yang paling penting adalah masalah integritas dan sikap anti korupsi setiap SDM di Kementerian Haji dan Umrah. by NNN

ANDHYKA MUTTAQIN, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang

Penanganan Antrean Haji Harus Lebih Baik

Ya, saya melihatnya sebagai terobosan yang sangat efektif dan efisien. Tentu, tantangannya besar. Menteri yang baru harus bekerja ekstra keras, lincah, dan bisa beradaptasi dengan cepat.



DPR sudah menyetujui perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Bagaimana pandangan Anda?

Saya menilai ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik. Indonesia adalah negara dengan jemaah haji terbesar di dunia. Selama ini, banyak masalah yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun.

Selain itu? Kedua, biaya haji yang terus meningkat. Ini menjadi masalah karena kemampuan masyarakat berbeda-beda, sehingga aksesnya menjadi tidak merata. Padahal, haji adalah rukun Islam, dan banyak orang ingin melaksanakannya.

Ada lagi catatan Anda? Selanjutnya, manajemen kuota yang rumit. Dengan jemaah muslim terbesar di dunia, seharusnya kuota

Banyak jemaah sudah menunggu sangat lama untuk mendapatkan kursi haji. Pertanyaannya, yang tersebut dikelola ke mana? Lalu, jika yang tersebut disimpan di bank, ke mana bunga banknya? Dengan adanya kementerian haji, transparansi terkait pengelolaan dana ini bisa lebih terjaga.

Kedua, biaya haji yang terus meningkat. Ini menjadi masalah karena kemampuan masyarakat berbeda-beda, sehingga aksesnya menjadi tidak merata. Padahal, haji adalah rukun Islam, dan banyak orang ingin melaksanakannya.

Ada lagi catatan Anda? Selanjutnya, manajemen kuota yang rumit. Dengan jemaah muslim terbesar di dunia, seharusnya kuota

haji kita bisa diperbanyak. Jika ada kementerian sendiri, negosiasi dengan Arab Saudi seharusnya bisa lebih fokus.

Bagaimana dengan pelayanan jika penyelenggaraan haji diurus oleh satu kementerian khusus? Saya amatir, pelayanan haji sering kali belum memuaskan. Jika ada kementerian yang fokus khusus mengurus haji, pelayanan bisa menjadi lebih baik.

Anda melihat pembentukan kementerian ini sebagai langkah yang efektif dan efisien?

Ya, saya melihatnya sebagai terobosan yang sangat efektif dan efisien. Tentu, tantangannya besar. Menteri yang baru harus bekerja ekstra keras, lincah, dan bisa beradaptasi dengan cepat. by NNN